

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara etimologis “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (World Bank, 2004). Alasan penulis menggunakan variabel jumlah penduduk miskin dalam penelitian ini sebagai variabel utama karena memiliki fungsi sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dan efektifitas kebijakan pembangunan ekonomi.

Tabel 1.1 di bawah ini menunjukkan jumlah penduduk miskin dari 2015 hingga 2024. Tahun 2015 jumlah penduduk miskin tertinggi terdapat di provinsi Banten sebesar 690.670 jiwa dan terendah di Provinsi Bali sebesar 218.790 jiwa. Seiring berjalannya waktu jumlah penduduk miskin mengalami fluktuasi. Hingga pada masa pandemi tahun 2020 jumlah penduduk miskin semakin meningkat di semua provinsi. Pada tahun 2021 mulai mengalami pemulihan perekonomian sehingga jumlah penduduk miskin semakin menurun. Pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin sebesar 777.490 jiwa di Provinsi Banten dan terendah ada di Provinsi Bali sebesar 176.210 jiwa. Oleh itu faktor kemiskinan menurut Suharto (2005) antara lain: (i) faktor individual yaitu orang miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan dari individu yang miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupan, (ii) faktor sosial yaitu kondisi-kondisi lingkungan sosial

yang menjebak seseorang menjadi miskin, (iii) faktor kultural yaitu kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan, (iv) faktor struktural yaitu struktur atau sistem yang tidak adil.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin Di Pulau Jawa dan Bali

Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)							
Tahun	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten	Bali
2015	368.67	4485.65	4505.78	485.56	4775.97	690.67	218.79
2016	385.84	4168.11	4493.75	488.83	4638.53	657.74	174.94
2017	393.13	3774.41	4197.49	466.33	4405.27	699.83	176.48
2018	372.26	3539.4	3867.42	450.25	4292.15	668.74	168.34
2019	362.3	3375.89	3679.4	440.89	4056	641.42	156.91
2020	496.84	4188.52	4119.93	503.14	4585.97	857.64	196.92
2021	498.29	4004.86	3934.01	474.49	4259.6	852.28	211.46
2022	494.93	4053.62	3858.23	463.63	4236.51	829.66	205.36
2023	477.83	3888.6	3791.5	448.47	4188.81	826.13	193.78
2024	449.07	3668.35	3396.34	430.47	3893.82	777.49	176.21

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai peningkatan hasil atau output masyarakat yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah faktor produksi dalam proses produksi (Todaro dalam Kumenaung et al., 2020). Dalam pertumbuhan ekonomi, penentuan koridor ekonomi dapat dilakukan melalui beberapa tahapan berikut. Pertama, menentukan pusat ekonomi. Pulau Jawa dan Bali menjadi pusat ekonomi karena pulau tersebut umumnya adalah pusat ekonomi, populasi dan pemerintahan di dalam setiap provinsi. Kedua, menentukan kebutuhan konektivitas antar pusat ekonomi. Dengan melihat arus lalu lintas barang akan memberikan gambaran transportasi baik dari jalur darat, laut, dan udara, serta simpul asal tujuan yang mendasari pemilihan koridor ekonomi di Indonesia. Ketiga, validasi dengan rencana pembangunan nasional.

Untuk dapat menentukan koridor ekonomi Indonesia, dapat dilakukan dengan mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah nasional, terutama pada struktur ruang wilayah nasional dan pola ruang wilayah nasional (Kuncoro, 2018).

Dapat dilihat pada tabel di bawah ini pada tahun 2015, Bali menjadi provinsi yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yakni 6,03 % dan DI Yogyakarta terendah yakni 4.95 % di Pulau Jawa dan Bali. Seiring berjalannya waktu hingga pada tahun 2020 pada saat pandemi Covid-19, laju pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa dan Bali mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2021-2022 berangsur membaik ditandai dengan peningkatan yang signifikan sebagai pemulihan ekonomi pasca Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali. Pada tahun 2023 dan 2024, Provinsi Bali mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang pesat karena dipengaruhi sektor pariwisata. Untuk wilayah Pulau Jawa pada periode tahun 2023 dan 2024 memiliki kecenderungan stabil. Alasan penulis menggunakan variabel laju pertumbuhan dalam penelitian ini karena, dapat diketahui bahwa Pulau Jawa dan Bali memiliki prospek yang besar untuk dikembangkan. Mengingat bahwa Pulau Jawa dan Bali merupakan pusat perekonomian, memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto dan untuk menguji sejauh mana variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan.

Tabel 1. 2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Jawa Dan Bali

	Laju Pertumbuhan Produk Regional Domestik Bruto									
Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DKI Jakarta	5.91	5.87	6.2	4.9	5.82	-2.39	3.55	5.25	4.96	4.9
Jawa Barat	5.05	5.66	5.33	4.95	5.02	-2.52	3.74	5.45	5	4.95
Jawa Tengah	5.47	5.25	5.26	4.95	5.36	-2.65	3.33	5.31	4.97	4.95
DI Yogyakarta	4.95	5.05	5.26	5.03	6.59	-2.67	5.58	5.15	5.07	5.03
Jawa Timur	5.44	5.57	5.46	4.93	5.53	-2.33	3.56	5.34	4.95	4.93
Banten	5.45	5.28	5.75	4.79	5.26	-3.39	4.49	5.03	4.81	4.79
Bali	6.03	6.33	5.56	5.48	5.6	-9.34	-2.46	4.84	5.71	5.48

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Inflasi dan kemiskinan memiliki hubungan yang erat. Oleh karena itu, Inflasi dapat didefinisikan sebagai naiknya harga komoditi yang disebabkan oleh tidak selaras antara program sistem pengadaan komoditi dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat di suatu negara tertentu. Menurut Mankiw (2006), inflasi merupakan fenomena alam, sehingga terjadi fluktuasi tingkat kenaikan harga yang signifikan. Inflasi yang mengalami kenaikan kerap dipandang oleh masyarakat sebagai permasalahan bagi perekonomian.

Dapat dilihat tabel 1.3 di bawah ini pada tahun 2015, tingkat inflasi di provinsi Bali mencapai 2,70%, Banten mencapai 4,29%, dan DKI Jakarta mencapai 3,30%. Siklus ini mencerminkan fluktuasi ekonomi makro yang dapat dipengaruhi oleh faktor seperti kebijakan moneter, permintaan domestik, dan harga komoditas global. Memasuki tahun 2016 hingga 2017 inflasi di sebagian provinsi di Pulau Jawa dan Bali cenderung stabil walaupun DIY dan Jawa Timur mengalami peningkatan yang signifikan pada 2017. Pada tahun 2018-2019 inflasi mengalami penurunan yakni 2,12% Jawa Timur dan 3,54% pada Jawa Barat. Hal ini menunjukkan adanya efektivitas pengendalian harga oleh otoritas. Masa pandemi 2020 dan 2021 mencatat inflasi terendah hal ini akibat adanya penurunan

permintaan dan aktivitas ekonomi. Akan tetapi, pada 2022 terjadi lonjakan di Pulau Jawa dan Bali hal ini didorong oleh kenaikan harga energi pasca pandemi dan gangguan rantai pasokan. Hingga 2023 dan 2024 menunjukkan stabilitas dengan inflasi turun 1,28% DIY dan 2,49% Banten. Alasan mengapa penulis menggunakan variabel inflasi dalam penelitian ini karena untuk dapat mengukur sejauh mana kestabilan harga berpengaruh terhadap kemiskinan.

Tabel 1. 3
Inflasi Di Pulau Jawa Dan Bali

Provinsi	Inflasi (persen)									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DKI Jakarta	3.3	2.37	3.72	3.27	3.23	1.59	1.53	4.21	2.28	1.48
Jawa Barat	2.73	2.75	3.63	3.54	3.21	2.18	1.69	6.04	2.48	1.64
Jawa Tengah	2.73	2.36	3.71	2.82	2.81	1.56	1.7	5.63	2.89	1.67
DIY	3.09	2.29	4.2	2.66	2.77	1.4	2.29	6.49	3.17	1.28
Jawa Timur	3.08	2.69	4.04	2.86	2.12	1.44	2.13	6.52	2.92	1.51
Banten	4.29	2.94	3.98	3.42	3.3	1.63	1.91	5.08	2.04	2.49
Bali	2.7	2.94	3.87	3.4	2.24	2.42	2.01	6.2	2.77	2.34

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dinilai mampu menciptakan pengaruh yang signifikan dalam beragam aktivitas perekonomian dan sosial. Dampak ini pada akhirnya mendorong kemajuan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan taraf kemakmuran serta efisiensi dalam kegiatan usaha (Fernández-Portillo et al., 2020). Lebih lanjut, TIK juga berperan dalam memberdayakan komunitas dengan membuka akses terhadap pemanfaatan dan pertukaran informasi. Kondisi ini berdampak pada peningkatan mutu pendidikan, penguasaan kompetensi kerja, perluasan peluang ekonomi, serta partisipasi tenaga kerja yang pada akhirnya berkontribusi terhadap upaya pengurangan kemiskinan.

Dapat dilihat pada tabel di bawah merupakan jumlah individu di Indonesia yang memiliki telepon genggam. Pada tahun 2015 dapat dilihat bahwa

DKI Jakarta secara konsisten mencatat angka tertinggi yakni sebesar 76,93%. Sementara itu, provinsi-provinsi lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Banten, dan Bali juga menunjukkan tren kenaikan meskipun dengan nilai presentase yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan DKI Jakarta. Individu yang memiliki telepon genggam mengalami percepatan yang cukup signifikan pada tahun 2022 hingga 2024. Sebagai contoh, Jawa Barat mengalami kenaikan dari 70,37% menjadi 78,5%, sedangkan Bali mengalami peningkatan dari 72,82% menjadi 82,7% dalam periode yang sama. Di sisi lain, terdapat fenomena penurunan yang terjadi pada tahun 2021 khususnya di DKI Jakarta, di mana angka kepemilikan mencapai 67,83%, sebelum akhirnya kembali menunjukkan tren positif pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini mengindikasikan adanya perkembangan yang positif. Dinamika ini diduga kuat dipengaruhi oleh beberapa variabel kunci, antara lain ekspansi infrastruktur digital, peningkatan pertumbuhan ekonomi serta kebutuhan komunikasi yang lebih efisien dan terjangkau. Alasan penulis menggunakan variabel proporsi individu yang memiliki telepon genggam terhadap jumlah penduduk miskin hal ini dikarenakan telepon genggam merupakan alat yang krusial dalam mendorong inklusi digital dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan memiliki telepon genggam di era digital dapat memudahkan untuk mengakses informasi, layanan, keuangan digital dan platform *e-commerce* dapat menjadi sarana bagi penduduk miskin untuk dapat meningkatkan pendapatan.

Tabel 1. 4
Proporsi Individu yang Memiliki Telepon Genggam di Pulau Jawa dan Bali

	Proporsi Individu yang Memiliki Telepon Genggam (persen)						
Tahun	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten	Bali
2015	76.93	59.5	54.97	64.79	55.29	60.49	63.77
2016	75.78	60.99	56.41	64.57	57.21	60.92	65.19
2017	76.99	62.55	57.62	65.73	58.3	61.63	66.24
2018	76.16	65.01	60.47	68.32	60.66	64.25	67.99
2019	78.42	66.24	61.66	67.66	62.16	65.21	69.61
2020	77.57	64.83	60.87	67.62	61.82	64.4	69.93
2021	67.83	62.76	62.76	69.81	62.99	68.2	71.65
2022	82.27	70.37	65.15	70.37	65.22	70.25	72.82
2023	82.47	68.87	64.74	71.37	64.6	69.87	73.2
2024	89.2	78.5	75.8	82.4	77.3	79.1	82.7

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

1.2 Perumusan Masalah

Berikut rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa dan Bali?
- 2) Bagaimana pengaruh inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa dan Bali?
- 3) Bagaimana pengaruh proporsi individu yang memiliki telepon genggam terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa dan Bali?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh proporsi individu yang memiliki telepon genggam terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa dan Bali.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa dan Bali.

- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh laju pertumbuhan terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa dan Bali.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) **Manfaat Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman dalam bidang ekonomi yang terkait terhadap gini indeks sehingga menghasilkan temuan baru yang dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya.

- 2) **Manfaat bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan pemerintah memberikan perhatian yang lebih terhadap tingkat ketimpangan agar pembangunan ekonomi dapat merata melalui digitalisasi ekonomi.

- 3) **Manfaat bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baik tentang tingkat ketimpangan di pulau Jawa dan Bali diharapkan masyarakat lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya internet terhadap pertumbuhan ekonomi serta dalam mengikuti perkembangan zaman.

1.5 Sistematika Pelaporan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulisan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini mencakupi berbagai teori yang berkaitan dengan penelitian ini, digunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diangkat pada penelitian, serta kerangka penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan beberapa poin antara lain lokasi penelitian, variabel yang digunakan, alat analisis, dan definisi operasional.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini mencakup hasil penelitian yang bersifat terstruktur. Dalam hasil penelitian dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun gambar sesuai dengan penelitian yang dibahas. Sedangkan, pembahasan merupakan hasil dari penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran di mana kesimpulan merangkum point penting dari hasil penelitian serta disajikan secara ringkas dan jelas. Sedangkan saran berisikan strategi yang telah dianalisis berdasarkan hasil pengukuran pada penelitian.

